

POLA PEMBERDAYAAN KULTURAL EKOLOGIS SOLUSI MENGATASI KERAWANAN PANGAN ORANG RIMBA DI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS JAMBI

Rina Astarika

UPBJJ-UT Jambi

Email korespondensi : rinaastarika@gmail.com

ABSTRAK

Orang Rimba atau yang dikenal dengan Suku Anak Dalam (SAD) adalah salah satu etnik tradisional yang ada di Indonesia. Orang Rimba merupakan sebutan bagi komunitas adat yang hidup dalam hutan di Provinsi Jambi. Populasi Orang Rimba terbanyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), Taman Nasional merupakan kawasan konservasi biodiversitas, selain juga merupakan tempat hidup bagi orang Rimba. Berbagai hasil penelitian di TNBD menunjukkan terjadinya degradasi dan kerusakan hutan akibat illegal logging, penebangan hutan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan dan personal tanpa kontrol, sehingga menyebabkan rusaknya konservasi hutan dan orang Rimba makin terdesak dan mengalami kekurangan pangan. Berbagai program pemberdayaan telah dilakukan oleh semua pihak, pemerintah, swasta ataupun LSM untuk memberdayakan Orang Rimba. Tujuan utamanya adalah agar Orang Rimba dapat berdaya untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Pola pemberdayaan bersifat kultural ekologis berdasarkan kearifan lokal adalah solusi pemberdayaan yang tepat diterapkan untuk Orang Rimba.

Kata Kunci : Orang Rimba – TNBD – Pola Pemberdayaan Kultural Ekologis

PENDAHULUAN

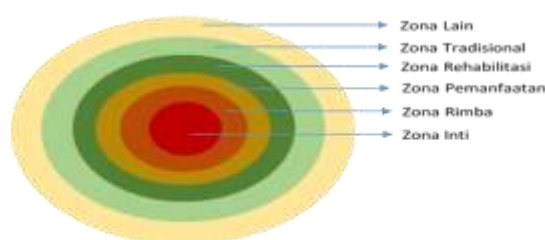
Pembangunan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa KAT menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Program Nawacita Presiden Jokowi-JK point ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Indonesia mempunyai basis hukum yang kuat untuk merealisasikan perlindungan sosial terhadap komunitas adat, sesuai pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.”*

Komunitas Adat (KAT) yang tinggal di Propinsi Jambi dikenal dengan sebutan “Orang Rimbo”, “Suku Anak Dalam” atau “Suku Kubu”. Pola penghidupan berpindah menyebabkan Orang Rimba terbagi ke dalam tiga wilayah ekologi. Sebagian kecil dari mereka hidup di Taman Nasional Bukit 30 (bagian utara Provinsi Jambi); populasi Orang Rimba terbanyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), sementara sisanya dijumpai di sepanjang Jalan Lintas Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Taman Nasional Bukit Dua Belas (BTNBD) pada pertengahan tahun 2013, total populasi Orang Rimba sekitar 3.000 jiwa

dan sekitar 1.775 jiwa dari populasi ini terkonsentrasi di TNBD, karena itu kawasan ini menjadi pusat persebaran dan budaya Orang Rimba (Sozi, 2014).

Awalnya TNBD adalah perluasan dari kawasan Cagar Biosfer Bukit Duabelas (CBB) dengan luas 29.485 Ha. Kawasan TNBD menjadi satu-satunya taman nasional yang dibentuk atas dasar pemenuhan kebutuhan penghidupan suku asli minoritas, yakni Orang Rimba yang dipadukan dengan kepentingan konservasi biodiversity (Aritonang 2005), hingga akhirnya tanggal 23 Agustus 2000 atas usulan KKI-Warsi, Menteri Kehutanan RI merubah status Cagar Biosfer Bukit Duabelas menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 258/Kpts-II/2000 sekaligus menambah luas areal menjadi 60.500 Ha, yang mencakup tiga wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari ± 65 % (37.000 ha), Kabupaten Sarolangun ± 15 % (9.000 ha) dan Kabupaten Tebo ± 20% (11.500 ha) (BTNBD, 2007). Perubahan status dari Cagar Biosfer menjadi TNBD menyebabkan beralihnya kebijakan pemerintah, karena pengaturan TNBD mengharuskan adanya sistem zonasi.

Zonasi di TNBD dibedakan menjadi 6 yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona tradisional dan zona lain, dan diilustrasikan seperti Gambar ... berikut.



Gambar 1 Pembagian zona di TNBD

Zona inti menurut aturannya adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki, diakses, dan dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk Orang rimba, demikian pula dengan zona rimba dan zona rehabilitasi. Orang Rimba sebagai masyarakat adat yang sudah lama mendiami kawasan Bukit Dua Belas hanya boleh menempati zona tradisional yang berada di pinggir kawasan TNBD untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan tradisi (Burlian, 2011). Hal ini mengakibatkan terganggunya, perekonomian Orang Rimba dan mereka mengalami kekurangan pangan. Di awal tahun 2015, nasib Orang Rimba seakan tidak pernah lepas dari kesengsaraan. Fenomena kematian 11 Orang Rimba karena kelaparan di kawasan TNBD merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah telah abai terhadap kelangsungan hidup mereka (Ferry, 2016).

Dalam upaya untuk mengatasi hal ini, Pemerintah melakukan berbagai program-program pemberdayaan. Tidak hanya Pemerintah, Swasta dan berbagai LSM dan NGO juga terlibat aktif didalamnya. Pemerintah berusaha memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi Orang Rimba dengan cara: membangun tempat pelayanan kesehatan, pemberian bantuan bibit, membangun tempat tinggal dan sebagainya.

Proses pembangunan pada masa orde lama identik dengan pembangunan fisik. Istilah pembangunan juga semakin berkembang sebagai terjemahan dari beragam istilah asing, sehingga terkadang mengandung kerancuan makna. Pembangunan sering disebut dengan istilah: *development, growth and change, modernization* bahkan juga *progress*. Sejatinya pembangunan itu tidak hanya fisik saja, tapi juga non fisik, baik proses maupun tujuan, baik duniawi maupun rohaniah (Mardikanto, 2010). Pembangunan juga mencakup perubahan ekologis, sosial dan kemasyarakatan (Budiman, 1995).

Namun upaya-upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah kepada Orang Rimba tidak sepenuhnya berhasil. Program-program pembangunan yang dikatakan bersifat *button up*, kenyataannya dilapangan berpola *top down*. Program pembangunan ini seringkali mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan terabainya Orang Rimba (Mahmud dan Edy, 2010). Hal ini ditandai dengan banyaknya perkampungan yang sudah dibangun Pemerintah namun ditinggalkan oleh Orang Rimbo. Mereka kembali lagi masuk kedalam hutan. Semenjak banyaknya hutan beralih fungsi menjadi Hutan Tanaman Industri oleh pihak swasta menyebabkan hutan tidak lagi menjadi tempat tinggal yang “adaptif” bagi Orang Rimba dan banyak Orang Rimba yang keluar dari hutan untuk mencari sumber pangan. Terjadinya kematian Orang Rimba karena kelaparan di kawasan TNBD merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah telah abai terhadap kelangsungan hidup mereka.

KONSEP PEMBERDAYAAN KULTURAL EKOLOGIS

Kata *empower* bersinonim dengan memberi daya atau kekuasaan kepada. Ada dua citra pemberdayaan, yaitu : (1) yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa; dan (2) kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Tipe 1 disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*), sedangkan tipe 2 disebut “*self empowerment*” atau pemberdayaan sendiri. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*kapabilitas*), yaitu: sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan (Bahua, 2015).

Suharto (2004) menjelaskan bahwa secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan) atau keberdayaan. Kekuasaan seringkali dihubungkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kekuasaan tercipta dari relasi sosial, karena itu, kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan memiliki konsep yang bermakna, sehingga (1) bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin

terjadi dengan cara apapun, dan (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas konsep ini menenankan pada pengertian kekuasaan tidak statis, melainkan dinamis.

Dalam melakukan pemberdayaan untuk mencapai khususnya pada suku minoritas konsep kultural ekologis menjadi perhatian utama, karena kultural ekologi sebagai studi tentang bagaimana penggunaan sumberdaya alam oleh manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial dan nilai budaya (Bennet, 1969) dari titik pandang warga setempat yang tercermin pada perilaku-perilaku yang diperlihatkannya. Pendapat ini didukung oleh Chambers, yang mengatakan pemberdayaan masyarakat harus merangkul nilai-nilai sosial yang merefleksikan paradigma baru pembangunan dengan sifat *people centered*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*. Pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan, merupakan kunci keberhasilan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, khususnya di desa tertinggal, sekaligus sebagai dasar untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk. Obyek dari kultural ekologi mengacu pada konsep-konsep ekosistem, sistem sosial budaya, adaptasi dan keseimbangan dinamis.

Tingkat Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (khususnya pada suku terpencil) terdapat derajat/ tingkatan keberdayaan masyarakat, hal ini menggambarkan kondisi masyarakat setelah diterapkan konsep tersebut. Lima tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Hurairah (2005) yaitu :

1. terpenuhinya kebutuhan dasar;
2. penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan;
3. dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan;
4. kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas;
5. kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya, terlihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi pemerintahan.

Lima tingkatan keberhasilan pemberdayaan masyarakat diatas, sesuai dengan teori kebutuhan yang digagas oleh Abraham Harold Maslow atau lebih dikenal dengan Teori Kebutuhan Maslow (Robins dan Judge, 1990 dalam Nugroho *et al.*, 2001) yang dikenal dengan hierarki kebutuhan (*hierarchy of needs*). Dia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari lima kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah :

1. Fisiologis : meliputi rasa lapar, haus, berlidung, seksual dan kebutuhan fisik lainnya
2. Rasa aman : meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional
3. Sosial : meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan
4. Penghargaan : meliputi factor-faktor penghargaan internal seperti kehormatan, otonomi dan pencapaian dan factor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian
5. Aktualisasi diri : dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi sesorang dan pemenuhan diri sendiri

Bagi Orang Rimba tercukupinya kebutuhan pangan



Gambar 2. 1. Hierarki Kebutuhan Maslow
(Sumber : faida, 2016)

Ekosistem dan Sistem Sosial Budaya

Konsep paling mendasar dalam analisis ekologi adalah ekosistem. Ekosistem menurut Hardesty (1977) adalah suatu interaksi antara kelompok tanaman dan satwa dengan lingkungan non hidupnya. Dalam hubungan antara ekosistem dan sistem sosial budaya, Bates (1953) mengatakan sebagai pandangan ekologis. Pandangan tersebut merupakan kelanjutan dari lingkungan dan komuniti biotiknya. Sistem adalah agregasi atau pengelompokan obyek-obyek yang dipersatukan oleh beberapa bentuk interaksi yang tetap atau saling tergantung. Dalam antropologi yang dimaksud sebagai keseluruhan integrasi adalah sistem sosial budaya atau kebudayaan, sedangkan dalam ekologi keseluruhan integrasi tersebut adalah suatu ekosistem (Foster, 1986)

Adaptasi dan Keseimbangan Dinamis

Konsep adaptasi yang menjadi rujukan adalah konsep Rapaport (1968), Sahllins (dikutip Bennet 1976) dan Hansen (1979). Rapaport (1968) mengemukakan bahwa konsep adaptasi sebagai berikut :

.....the process by which organisms or groups of organism through responsive changes in their states, structures, or compositions, maintain homeostatis in and amongst themselves in the fact of both short-term environmental fluctuations and longterm changes in compositions or structure of their environment.

Dengan memasukkan unsur adaptasi dalam analisisnya maka ekologi menjelaskan secara sistemik dan saling ketergantungan antar komponen memperhatikan proses pengembangan, pemeliharaan dan perubahan hubungan antar komponen. Analisa ekologi dapat bekerja dengan memasukkan unsur lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Menurut Hansen (1979) adaptasi sebagai suatu konsep proses penyesuaian pada keadaan yang berubah. Bennet (1976) menganggap bahwa adaptasi adalah kapasitas manusia untuk melakukan *self objectification*. Adaptasi bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan makanan dari suatu kawasan tertentu, tetapi juga mencakup persoalan transformasi sumberdaya lokal. Bennet juga menyatakan terdapat tiga konsep mengenai adaptasi yaitu : *adaptive behavior*, *adaptive strategies* dan *adaptive process*. **Adaptive behavior** menunjuk pada cara-cara aktual masyarakat menemukan/merencanakan untuk memperoleh sumberdaya untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. **Adaptive strategies** merupakan pola umum yang terbentuk melalui banyak proses penyesuaian pemikiran masyarakat secara terpisah. Dalam hal ini masyarakat merespon permasalahan yang dihadapi dengan melakukan evaluasi terhadap alternatif yang mungkin dan konsekuensinya, serta berusaha menempatkan permasalahan tersebut dalam suatu design strategis yang lebih luas untuk mengimbangi konflik kepentingan dari banyak pihak. **Adaptive process** adalah perubahan-perubahan yang ditunjukkan melalui proses yang panjang dengan cara menyesuaikan strategi yang dipilihnya.

Menurut Bennet (1976) penjelasan perspektif ekologi membutuhkan pengidentifikasian faktor-faktor lingkungan yang paling penting dalam menghambat dan mengembangkan perilaku partisipan dan mengasumsikan bahwa organisasi sosial budaya adalah hasil dari proses-proses adaptif dalam rangka mengantisipasi kondisi kedepan. Analisa ekologi mengisolasi variabel-variabel fisik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Bennet menyatakan bahwa basis ekologi manusia adalah kapasitas manusia untuk melakukan *self objectification*, belajar dan mengantisipasi.

KASUS PEMBERDAYAAN ORANG RIMBA DI TNBD PROPINSI JAMBI

Berbagai Program Pemberdayaan pada Orang Rimba

Program pemberdayaan pada Orang Rimba telah dimulai sejak tahun 1998 kala pemerintah pusat meluncurkan program Sistem Pemukiman Sosial untuk suku terasing yang ada di 18 provinsi di Indonesia. Beberapa kawasan yang ada di Jambi, menerapkan Sistem Pemukiman Sosial Tipe Pemukiman di Tempat Baru (SPS-TPB) dimana kelompok sasaran dibangun kawasan perumahan yang terletak di luar tempat tinggal mereka semula. Selain itu pihak swasta yaitu perusahaan yang ada disekitar TNBD melakukan berbagai program pemberdayaan pada Orang Rimba melalui Program *Corporate Social Responsibility* dan juga pihak LSM baik dalam maupun luar negeri juga ikut terlibat aktif memberdayakan Orang Rimba.

Berbagai Program yang sudah dilakukan berbagai pihak, ternyata tak cukup mampu untuk mengangkat derajat kehidupan Orang Rimba karena penerapannya belum sepenuhnya mengacu pada aspirasi Orang Rimba dan belum menyentuh apa yang sebenarnya mereka inginkan. Meskipun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat partisipatif atau bottom up namun dalam implementasinya masih bersifat top down. Strategi yang dilakukan oleh petugas lapangan dalam membina Orang Rimba telah mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan namun karena mengabaikan kondisi lapangan, penerimaan dari Orang Rimba tidak penuh, bahkan terjadi penolakan. Program pemberdayaan yang selama ini dilakukan, baik oleh pihak pemerintah, pihak swasta ataupun pihak-pihak lainnya lebih menekankan dan menitikberatkan kepada program *charity* (sumbangan, bantuan dan amal) atau lebih kepada program *how to give something* (Sjafari, 2011).

Petugas lapangan pemerintah yang telah diberi pemahaman tentang paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, ternyata belum dapat mengimplementasikan dengan baik. Faktor penghambat lainnya datang dari kondisi geografis dan tofografis yang sulit dijangkau serta kualitas sumber daya manusia pelaksana program di lapangan, yang belum menguasai keterampilan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan LSM yang bergerak dalam pembinaan Orang Rimba jelas terlihat di Jambi. Masing-masing pihak berjalan sendiri, bahkan terkesan saling menyalahkan sehingga belum ada program terpadu yang dapat dijalankan. Pemborosan anggaran pemerintah pun terjadi dimana-mana karena programnya dijalankan oleh petugas yang kurang bersemangat atau dinamis sebagaimana yang dimiliki para pekerja LSM.

Meski beberapa kabupaten yang didiami Orang Rimba di Provinsi Jambi mengaku telah mencanangkan program terpadu untuk membina KAT namun sampai saat ini belum terekspos bentuk program terpadu yang didengung-dengungkan tersebut. Demikian juga dalam program strategis Jambi EMAS, belum terlihat program pembinaan KAT. Meskipun populasi KAT tidak besar tapi terkait kekhasannya, sudah semestinya mereka memperoleh perhatian yang lebih khusus.

Pola Pemberdayaan Kultural Ekologis suatu Solusi

Budaya Orang Rimba cenderung *paternalistic* (patuh dan taat pada pemimpin adat) dan tidak akan berani melakukan pelanggaran terhadap norma sosial maupun norma adat yang berlaku. Masyarakat adat di Indonesia perlu dipahami sebagai komunitas-komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya dan mereka mempergunakan tradisi sebagai alat untuk menghadapi kekuatan dominan yang menciptakan situasi ketidakadilan dalam kehidupan mereka (Arizona, 2014). Karena itu program pemberdayaan yang akan diterapkan pada komunitas ini hendaknya tidak dipisahkan dengan kultural ekologis Orang Rimba.

Pemberdayaan Orang Rimba dimulai melalui perencanaan kaum elit (pemangku adat), dikarenakan Orang Rimba menganut sistem paternalistik. Untuk menghindari bias pemberdayaan, dilakukan melalui suatu aksi sosial secara partisipatif, yang dimulai dari tahap perencanaan (identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, dan disain program), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta menikmati hasil. Chambers (1996) mengatakan salah satu metode yang dianggap cukup efektif untuk mendisain program bagi indigenous people melalui metode PRA (*Participatory Rural Apraisal*). Falsafah yang terkandung didalam metode ini adalah agar mereka dapat menolong diri sendiri dan orang lain serta membangun dari pinggiran (*Helping people ro help themselves and others*) dan (*putting the people first*). Selain diberikan *power* untuk mendefinisikan kebutuhannya secara mandiri dan didampingi oleh pendamping lapangan. Dengan demikian setiap instrument yang diberikan melalui program hanya bersifat stimulus.

Pola Pemberdayaan Orang Rimba melalui PRA dilandasi gagasan pemikiran *ecological perspectives*, terutama apa yang dikenalkan Germain dan Gitterman (1980) tentang The life model, bahwa seseorang dan lingkungannya memiliki hubungan *reciprocal each influences the other over time, through exchanges*. Jadi, apabila ingin menyelesaikan permasalahan Orang Rimba maka tidak terlepas dari permasalahan Orang Rimba dan Komunitasnya.

KESIMPULAN

Secara sepintas, berbagai program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan LSM memberikan angin surga bagi adanya pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Namun dalam prakteknya hal tersebut masih jauh dari harapan. Berbagai Program Pemberdayaan yang dilakukan belum memperhatikan kultural ekologi, sehingga belum mampu memberikan perlindungan bagi Orang Rimba. Oleh karenanya, kedepan dibutuhkan pola pemberdayaan yang memiliki prespektif kultural ekologis agar Orang Rimba dapat sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang R. (2005). *Prospek Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas. Tidak dipublikasikan*. Edi, Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Rafika Aditama, Bandung.
- BTNBD (2013). *Laporan Sensus Orang Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas*. Sarolangun.
- Budiman A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Bahua M. I. (2015). *Model Pengembangan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Boalemo*. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya*. 1 (2): 227 – 294.
- Bennet J. W. (1969). *Nothern Plainsmen: Adaptive Strategy and Agrarian Life*. AHM Publishing. Arlingtong Height.
- Burlian S. (2011). *Resistensi Orang Rimba (Studi Tentang Perlawanan Orang Rimba Menghadapi Kebijakan Pengelolaan TNBD Propinsi Jambi)*. Tesis. Program Pascasarjana. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ferry Y. (2016). *Sejarah Pembinaan Terhadap SAD di Kabupaten Batanghari Propinsi Jambi 1970-2014*. scholar.unand.ac.id/13286/ (diakses tanggal 5 Agustus 2017).
- Foster G. (1986). *Financial Statement Analysis, Second Edition*, Singapore: Prentice-hall.
- Hardesty D. L. (1977). *Ecological Anthropology*. New York. John Wiley.
- Mahmud M. dan Edi K. (2010). "Jurnal Pembangunan Sosial Masyarakat Terasing di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Masyarakat Suku Anak Dalam di Muaro Jambi". *Jurnal Media Akademika*. 25 (4): 331-348.
- Mardikanto T. (2010). *Komunikasi Pembangunan Acuan Bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. UNS Press. Surakarta.
- Muntholib. (1995). "Orang Rimbo: Kajian Struktural dan Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal Propinsi Jambi", *Disertasi*, Doktoral Universitas Padjajaran. Bandung:
- Sjafari Agus, (2011). *Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Kelompok, Perubahan Sosial (Sebuah Bunga Rampai)*, FISIP UNTIRTA, Serang. Aritonang R.,

2010. Orang Rimba Menantang Zaman. Penerbit. Komunitas Konservasi Indonesia WARSI. Jambi.

Suharto E. (2004). Metodologi Pengembangan Masyarakat. *Community Work in New Zealand*. [Http://www..policy.hu/suharti/modul a/makindo 19.htm](http://www..policy.hu/suharti/modul a/makindo 19.htm). Diakses 14 Mei 2014.

Zozi., A. (2014). *Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi*. Penerbit BTNBD Jambi